

Tantangan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Konteks Persaingan Globalisasi

Bq Dewi Hartika¹ Intan Sholatiyah² Nurhasanah³

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: aika49252@gmail.com¹ intansholatiyah641@gmail.com² nurhasanah-fkip@unram.ac.id³

Abstract

The implementation of regional independence in Indonesia has faced several political and legal difficulties, including tensions between decentralization strategies and the public interest. Provincial independence is expected to bring equity and justice, as well as enabling community participation in regional development. However, the exercise of broad, genuine, and capable territorial independence also requires adjusting the worldview of public improvement from development to a more equitable and adapted dissemination of progress. In the context of globalization competition, regional autonomy in Indonesia must strengthen the basis of the national economic system and face the challenges of globalization of Creation, public business actors, and financial liberation. Regional autonomy must also facilitate the development of socio-economic institutions in the region, and enable the welfare of the people of their respective regions. In local governance efforts, territorial independence and monetary decentralization are seen as important steps to meet the period of financial globalization. However, provincial independence should not be confused with globalization tendencies, if Indonesia's financial framework needs to survive the openness of globalization. Within this framework, the implementation of regional independence in Indonesia must pay attention to political and legal challenges, as well as strengthen the basis of the national economic system and face the challenges of globalization. Regional autonomy should slow down the development of socio-economic institutions in the region and enable the welfare of the people derahnya each.

Keywords: Regional Autonomy, National Law, National Politics

Abstrak

Pelaksanaan kemerdekaan daerah di Indonesia telah menghadapi beberapa kesulitan politik dan hukum, termasuk ketegangan antara strategi desentralisasi dan kepentingan publik. Kemerdekaan provinsi diharapkan dapat membawa pemerataan dan keadilan, serta memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Namun, pelaksanaan kemerdekaan wilayah yang luas, asli, dan mampu juga memerlukan penyesuaian pandangan dunia perbaikan publik dari pembangunan menjadi penyebaran kemajuan yang lebih adil dan disesuaikan. Dalam konteks persaingan globalisasi, otonomi daerah di Indonesia harus memperkuat basis sistem ekonomi nasional dan menghadapi tantangan globalisasi Penciptaan, Pelaku bisnis publik, dan pembebasan finansial. Otonomi daerah juga harus memperlambat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di daerah, serta memungkinkan kesejahteraan rakyat daerahnya masing-masing. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemandirian teritorial dan desentralisasi moneter dipandang sebagai langkah penting untuk memenuhi periode globalisasi keuangan. Bagaimanapun, kemerdekaan provinsi tidak boleh dikacaukan dengan kecenderungan globalisasi, jika kerangka keuangan Indonesia perlu bertahan dalam keterbukaan globalisasi. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan kemerdekaan wilayah di Indonesia harus memperhatikan tantangan politik dan hukum, serta memperkuat basis sistem ekonomi nasional dan menghadapi tantangan globalisasi. Otonomi daerah harus memperlambat pengembangan kelembagaan social ekonomi di daerah dan memungkinkan kesejahteraan rakyat daerahnya masing-masing.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Hukum Nasional, Politik Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai tatanan pemerintahan yang terdesentralisasi di Indonesia bukanlah hal baru. Pelaksanaan kemerdekaan daerah benar-benar itu dikerjakan pada tahun 1945. Meskipun demikian, hingga saat ini pelaksanaan otonomi wilayah belum menunjukkan hasil yang ideal. Lagi-lagi setelah perbaikan perubahan terjadi dan jatuhnya pemerintahan Suharto, pembicaraan tentang pelaksanaan kebebasan wilayah terdengar, lebih membunyi dan diminta untuk segera dilaksanakan. Ajakan kerja sama lingkungan dalam pelaksanaan otonomi wilayah disambut baik oleh Presiden Habibie dengan poin bahwa pedoman No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Pedoman No. 25 tahun 1999 tentang pemikiran terkait uang antara pemerintah pusat dan pemerintahan negara bagian terdekat kemudian diselesaikan. Dengan pengesahan kedua peraturan tersebut, terjadi perubahan pandangan dunia, khususnya dari pemerintahan yang bersatu menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi. Di bawah peraturan kemerdekaan daerah, sanksi undang-undang tersebut dapat dijalankan setelah sekian lama berdiri. Selama penyelenggaraan Presiden Abdurachman Wachid, peraturan kemerdekaan provinsi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari.

Dunia yang kita tempati adalah dunia yang saling berhubungan secara universal. Keanehan alam, mental, sosial, ekonomi, budaya, dan iklim saling terkait satu sama lain. Pada tahap inilah kita menginginkan pandangan dunia, atau setidaknya, visi pengakuan yang lain. Melalui hal ini, kita benar-benar perlu segera mengesahkan dua pemikiran; pertama, dunia tempat kita hidup sedang mengalami perubahan menuju contoh sosial lainnya. Kedua, kami sangat menginginkan perangkat baru yang masuk akal untuk menemukan pencapaian hidup dalam budaya lain. Budaya baru itu kini telah berubah menjadi kenyataan. Modernisasi, yang digambarkan dengan dorongan dalam sains dan pembangunan, yang seringkali juga disarankan sebagai atribut penting dari lingkungan hidup saat ini, benar-benar menghadapi konsekuensi yang berbeda. Oleh karena itu, individu tampaknya dibawa ke masalah hutan belantara, karena forward harus mundur. Beberapa peneliti dan teknolog yang serius, tak lama kemudian akan mempertanyakan dan bahkan berbelit-belit masalah kewajiban mereka, kemudian muncul pada isu-isu dan pemanfaatan penemuan-penemuan Sains dan inovasi. Menetapkan batas risiko untuk item inovatif mencerminkan sentuhan kesadaran akan hambatan kapasitas peneliti dan teknolog, bagaimana mereka benar-benar tidak memiliki kendali penuh atas konsekuensi dari "ciptaan" mereka sendiri.

Akhir-akhir ini ungkapan "globalisasi" semakin sering digunakan untuk merujuk pada lingkungan baru kehidupan di planet ini, yang digambarkan oleh kemajuan logis dan mekanis. Secara bersamaan, kelas dan simposium diadakan dengan maksud untuk menjamin kepercayaan dan menyebarkan penipuan menyesatkan tentang budaya baru. Pada tingkat yang paling dalam, tidak dapat disembunyikan bahwa mengapa globalisasi pada umumnya mengganggu yang sedang berlangsung adalah tanggapan atas pertanyaan: Bagaimana saya bisa bertindak dengan empati di lingkungan dunia baru ini? Pertanyaan ini mengatur akhlak, karena mempertanyakan pedoman cara berperilaku manusia (Darmaputra, 1998). Berkenaan dengan strategi publik pada masa kemerdekaan wilayah dan di tengah globalisasi, khususnya di tengah persaingan dunia, menurut Nugroho (2004), standar perilaku yang penting yaitu panggung dan kegiatan kunci yang dapat membangun dan menumbuhkan lingkungan ekologis yang mempertimbangkan setiap penghibur., baik bisnis maupun nirlaba untuk memiliki pilihan untuk membentuk diri mereka menjadi penghibur yang serius, di tingkat lokal maupun di tingkat dunia. Iklim ini harus benar-benar dibuat dengan strategi terbuka.

Permintaan politik yang telah tercipta di zaman sekarang ini sejak tahun 1980-an tidak diragukan lagi telah menunjukkan bahwa pengaturan administrasi terbuka yang lebih baik bagi kebanyakan orang merupakan salah satu tolok ukur keabsahan keaslian dan batasan

politik dari badan pembuat hukum di seluruh dunia (Wahab, 1999). Sangat disayangkan, jika permohonan politik ini seringkali tidak sesuai dengan negara, melalui administrasi pemerintahan. Dengan demikian, refleksi dasar diharapkan menemukan pengaturan elektif yang dianggap masuk akal dan siap untuk memenuhi persyaratan baru yang berbeda untuk administrasi publik yang efektif dan berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan diarahkan dengan menggunakan metodologi subjektif yang jelas. Teknik eksplorasi akan dipimpin melalui studi tulis, dimana informasi informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai konsekuensi penilaian sebelumnya dan penilaian yang belum terkait dengan subjek dan diskusi dalam audit ini. Setelah berkumpul informasi eksplorasi secara efektif, informasi tersebut akan ditangani dengan segera sehingga dapat diselidiki dengan sangat baik, sehingga tujuan yang signifikan dapat dibuat dari tinjauan ini (Sarosa,2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Kemandirian itu didapat dari kata autonom (Bahasa Yunni) yang artinya menjaga jati diri yang sehat. Pada dasarnya, kemerdekaan provinsi merupakan upaya untuk mengembangkan daerah setempat melalui penguatan potensi wilayah yang ideal. Signifikansi kemerdekaan provinsi adalah bahwa kabupaten memiliki hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengurus keluarganya sendiri sesuai pedoman dan aturan materi (Language Center, 2001: 805). Pedoman No. Pasal 22 tahun 1999 pasal 14 menyatakan bahwa kekuatan lokal bebas untuk mengendalikan dan menangani kepentingan jaringan terdekat sesuai dorongan mereka sendiri sesuai dengan tujuan daerah setempat sesuai peraturan. Bagian dari "dorongan sendiri" dalam kemerdekaan lokal memberikan "roh" pada pelaksanaan Pergantian peristiwa Provinsi yang lebih partisipatif. Tanpa upaya untuk mendorong dorongan lingkungan, kemerdekaan provinsi, seperti yang dianggap normal untuk memberikan perasaan demokratisasi terhadap pergantian peristiwa lokal, akan kehilangan arti pentingnya secara umum.

Otonomi yang luas sebenarnya merupakan klarifikasi dari desentralisasi keseluruhan. Dalam dunia yang sempurna, pelaksanaan kemerdekaan yang luas juga harus disertai dengan standar pemerintahan mayoritas, pemerataan, nilai, penguatan dan dukungan daerah setempat, mengeluarkan potensi dan keanekaragaman lokal yang memusatkan perhatian pada pengerjaan ekonomi di wilayah tersebut. dan kotamadia. Pelaksanaan kemerdekaan daerah harus dilihat dari perspektif yang berbeda, khususnya pertama, mengenai wilayah (daerah), harus ditempatkan untuk melibatkan dan memisahkan potensi wilayah. Kedua, sejauh menyangkut struktur administrasi, terletak pada penguatan badan legislatif terdekat dalam menangani aset mereka dengan penuh perhatian dan memegang standar solidaritas negara bagian dan negara. Ketiga, sejauh penguatan wilayah lokal dan kontribusi wilayah lokal dikembangkan di kabupaten yang berbeda sesuai dengan kapasitas masing-masing kabupaten.

Peraturan dan pedoman kemerdekaan daerah telah dibuat sejak Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa kepala Negara berawal dari ajakan Lama, ajakan baru, hingga pionir status sekarang telah merenungkan betapa pentingnya kemerdekaan provinsi mengingat luasnya wilayah Indonesia yang menjadi kewajiban otoritas publik. Pemberian kemerdekaan kepada kabupaten pada dasarnya merupakan upaya penguatan untuk mengawasi kemajuan di daerahnya. Lokal diharapkan sedikit demi sedikit memiliki pilihan untuk memberikan

ketergantungan mereka pada bantuan pemerintah pusat dengan memperluas kreativitas, meningkatkan kemajuan, dan memperluas kemandirian mereka. Jika pelaksanaan kemerdekaan wilayah sesuai kaidah dan kaidah yang telah disusun, maka kerinduan yang menenteramkan untuk memahaminya "pergantian peristiwa teritorial" daripada "pergantian peristiwa lokal" dapat tercapai. Kemandirian wilayah memberikan keinginan yang luar biasa kepada kabupaten untuk lebih meningkatkan kemudahan penggunaan dan administrasi hasilguna untuk menawarkan jenis bantuan yang berhasil kepada masyarakat. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kaleng terdekat menuntaskan pekerjaan pemajuan dan pembinaan local area drive secara adil, sehingga target perbaikan dan pemajuan local area drive berjalan dengan adil, sehingga target perbaikan terkoordinasi juga, disesuaikan dengan kondisi dan isu-isu yang ada di daerah tersebut.

Faktanya, sangat mengejutkan bahwa pelaksanaan dan pemanfaatan kebebasan bersama sejak Permintaan Lama, kepentingan baru dan sampai saat ini belum pernah selesai. Berbagai variabel yang membuat pelaksanaan otonomi wilayah menjadi tidak lancar merupakan konsekuensi dari kepentingan politik para spesialis sejalan dengan pemanfaatan kemerdekaan daerah sehingga para pakar pada umumnya akan tetap bersatu dan pemerintahan tiran melksanakan. Dalam ekspansi, kepentingan politik para perintis negara untuk mengawasi dan memimpin secara lugas mempolitisasi kemerdekaan provinsi membawa kemerdekaan teritorial semakin mengacaukan tujuan. Sebuah model adalah bahwa selama penyelenggaraan Presiden Suharto, sebuah proyek percontohan disusun untuk melaksanakan kemerdekaan provinsi di 26 kabupaten Tingkat II dengan memperhatikan Peraturan Nomor 5 tahun 1974, namun tidak membuahkan hasil.

Pemanfaatan kemandirian daerah melalui Peraturan No. 22 tahun 1999 masih belum mencari struktur, dengan alasan mentalitas otoritas publik masih "samar-samar". Di satu sisi, pemerintah tahu bahwa kemerdekaan wilayah sangat mengerikan untuk dilaksanakan sepenuhnya, tetapi sekali lagi otoritas publik juga berusaha untuk tetap menguasai wilayah tersebut dengan tegas. Ini harus terlihat dalam kekuasaan yang sangat luas yang belum ditangani oleh otoritas publik, terutama potensi yang sangat besar sebagai sumber mata air Uang. Demikian pula, kekuatan manajerial lain yang juga dapat berpikir dua kali tentang pelaksanaan kebebasan bersama adalah kekuatan spesialis publik untuk melepaskan otonomi yang telah diberikan kepada daerah tersebut. Sudah cukup lama sejak pernyataan kemerdekaan daerah di Indonesia, penguatan wilayah yang selama ini didukung dengan antusias ternyata belum terlaksana secara ideal. Kemajuan di kabupaten kurang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan daerah setempat. Pilihan dan proyek pemerintah perbaikan memang mengecualikan area lokal, sehingga program kemajuan di ruang tersebut akan cukup sering dilakukan dari atas ke bawah daripada pengaturan hotom up. Ada beberapa hal yang harus dipikirkan agar kemerdekaan provinsi dapat dipahami. Pertama-tama, harus dipahami bahwa kemandirian lokal harus terus-menerus dimasukkan ke dalam struktur.

Negara Republik Indonesia. Kebebasan provinsi merupakan subsistem dalam keseluruhan struktur pemerintahan. Selain itu, diperlukan kemauan politik dari semua kelompok seperti pemerintah pusat, administrasi negara bagian terdekat, dan daerah setempat. Kemauan politik, segala sesuatu yang sederajat, dapat membentengi tujuan pembangunan kabupaten. Kemauan politik ini seharusnya membendung tahap awal, pecahan, penalaran etnosentris, dll. Ketiga, diperlukan tanggung jawab tinggi dari berbagai kalangan yang sangat akrab sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat terlaksana.

Akibat Implementasi Otonomi Daerah Di Indonesia

Selama kurang lebih 60 tahun, kemerdekaan Indonesia, otonomi wilayah juga ikut serta dalam perjalanan negara Indonesia. Pada saat Permintaan kemerdekaan wilayah yang Lama belum sepenuhnya dilaksanakan, mengingat para kepala negara yang menjalankan pemerintahan mayoritas terarah pada umumnya akan menjadi diktator dan sentralistik. Selain itu, dalam dua periode tersebut terdapat banyak mutilasi dalam strategi-strategi yang berkaitan dengan kemerdekaan wilayah. Jelas, kita belum memiliki pilihan untuk melihat dampak dan dampak pelaksanaan kemerdekaan provinsi dalam dua periode tersebut, dengan alasan sebenarnya kemerdekaan wilayah belum sepenuhnya dilaksanakan, meskipun banyak peraturan dan pedoman telah dibuat. dibuat untuk melaksanakan kemerdekaan daerah. Dalam perubahan tersebut, kepentingan untuk melaksanakan kemerdekaan provinsi sangat ekstrim hingga otoritas publik benar-benar mengubah peraturan yang mengatur otonomi wilayah, khususnya Pedoman No. 22 tahun 1999 tentang administrasi daerah. Setelah 2 tahun kemajuan dan sosialisasi untuk menjalankan metodologi otonomi bersama, kebebasan daerah berjalan sesuai harapan pada tanggal 1 Januari 2001, pada masa kekuasaan publik Presiden Abdurachman Wahid. Setelah sekitar 4 tahun kebebasan bersama yang terbatas, dampak nyata adalah naiknya dua kelompok yang memiliki sudut pandang berbeda terhadap kemerdekaan daerah. Dari satu sudut pandang, ada individu-individu yang laten dan skeptis terhadap hasil strategi kemerdekaan wilayah, dengan mempertimbangkan perjumpaan pelaksanaan kemerdekaan provinsi sebelumnya. Pertemuan lokal ini tidak terlalu bersemangat untuk menawarkan bantuan atau sesuai program yang telah ditetapkan dalam kemerdekaan provinsi. Kemudian lagi, ada kumpul-kumpul yang berharap terhadap kemajuan strategi kemerdekaan provinsi karena penataan ini sangat optimis dan dijunjung tinggi oleh hampir seluruh kabupaten dan semua bagian.

Selain itu, tujuan untuk segera mengakui kemerdekaan wilayah juga merupakan pembedaan dari kelompok-kelompok yang secara moneter dan politik terkait dengan pengaturan kemerdekaan lokal. Juga, individu-individu yang belum ditunjuk oleh kegembiraan perubahan untuk mengambil alih kemerdekaan lokal adalah kemajuan tanpa batas untuk mengakui Pemerintah sesuai keinginan terdalam mereka. Orang-orang dari daerah yang kaya akan aset, tetapi tidak mendapatkan konsekuensi perbaikan sampai saat ini, menganggap ekonomi teritorial sebagai harapan yang bagus untuk menjalani hidup mereka. Harapan luar biasa dalam mengakui kemerdekaan wilayah telah mengakui daerah-daerah yang saling berhubungan untuk bekerja pada pendidikan asli provinsi (Cushion). Ada beberapa hal yang harus dimungkinkan untuk secara serius meningkatkan gaji terdekat dengan cara yang paling sederhana, lebih spesifik dengan menyelesaikan pengeluaran dan tuntutan. Model lain, sepenuhnya diharapkan untuk perdebatan antar wilayah termasuk batas wilayah yang memiliki potensi keuangan tinggi. Mata air pembayaran teritorial seringkali juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan yang bersifat provinsial, terdekat, etnosentris, tahap awal, sering kali merupakan kebijakan otonomi daerah yang diusahakan dapat menjadi benar disintegrasi bangsa

Terlepas dari konsekuensi buruk dari pelaksanaan kebebasan wilayah seperti yang telah disebutkan di atas, juga terdapat pengaruh positif terhadap diharapkan dari kemajuan kemerdekaan wilayah. Udara di daerah-daerah saat ini pada umumnya akan berlomba satu sama lain untuk membangun kemampuan daerah tersebut dengan cara yang berbeda. Semua bagian masyarakat yang berasal dari negara bagian terdekat dan individu lokal pada umumnya diharapkan dapat mengembangkan imajinasi mereka dan memiliki pilihan untuk maju di berbagai bidang. Wilayah dan aset perbaikan dan pengembangan yang dulunya kurang dipertimbangkan untuk dibuat, sekarang dapat menjadi pilar lokal yang mungkin.

Demikian pula, kemandirian lokal mendorong demokratisasi dalam eksistensi manusia, mendorong persaingan yang kokoh, penyampaian kekuatan sesuai kapasitas.

Perbedaan kultur Sebagai Dampak Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia

Pelaksanaan otonomi wilayah di berbagai wilayah di Indonesia berdampak, baik hasil yang positif maupun yang tidak bersahabat, misalnya sebagian dari model yang baru-baru ini dirujuk. Demikian pula, kebebasan lokal juga telah membawa perubahan sosial-sosial di Indonesia. Pengertian budaya atau kebudayaan dalam arti luas menurut E. B. Tylor merupakan mind blogging menggabungkan informasi, keyakinan, etika, hukum, adat istiadat dan berbagai kapasitas serta kecenderungan yang diperoleh masyarakat sebagai warga negara melalui pengalaman pendidikan (Tylor in Soekanto, 1969: 55). Dalam arti terbatas, budaya dicirikan sebagai konsekuensi dari penciptaan, pekerjaan, dan tujuan manusia untuk mengomunikasikan kerinduannya beauty. So gagasan budaya dalam pengertian terbatas adalah sebagai hal-hal yang imajinatif. Sesuai dengan jaminan otoritas publik untuk melaksanakan kemerdekaan provinsi, telah terjadi perubahan pandangan dunia (Warseno di Ambardi dan Prihawantoro, 2002: 181), khususnya seperti:

1. Pandangan dunia dari sentralisasi ke desentralisasi
2. Pendekatan tertutup pandangan dunia untuk strategi terbuka (langsung)
3. Pandangan dunia yang menjadikan daerah setempat sebagai objek kemajuan terhadap daerah setempat yang menjadi subjek perbaikan.
4. Pandangan dunia dari kemandirian yang tulus dan mampu menjadi kemandirian yang luas, nyata, dan penuh perhatian.
5. Pandangan dunia dari asosiasi yang sia-sia menjadi asosiasi yang efektif.
6. Pandangan dunia tentang penataan dan pelaksanaan tugas-tugas yang top-down ke perspektif struktur pengorganisasian top-down dan botton-up yang dicampur.

Perubahan perspektif ini juga berdampak pada gaya hidup jaringan lokal dalam menyelesaikan kegiatan mereka yang terkait dengan pelaksanaannya kemerdekaan wilayah. Penyesuaian pandangan dunia tentang pemerintahan yang terkonsentrasi menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi telah menimbulkan gejala di otoritas pemerintah terdekat yang akrab dengan program toleransi yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat. Saat ini mereka diharapkan dapat menjalankan pemerintahan yang produktif dan berkualitas administrasi serta memasukkan investasi daerah setempat. Negara-negara tetangga diharapkan dapat secara bebas menyelesaikan latihan penataan, pelaksanaan hingga pengawasan program perbaikan yang dilakukan di wilayahnya. Demikian pula, kabupaten diharapkan memiliki opsi untuk mendukung sebagian besar latihan peningkatan mereka sehingga diperlukan SDM yang bersertifikat, imajinatif, dan kreatif, yang diharapkan dapat menghasilkan perenungan, gagasan, dan strategi untuk melacak sumber pendanaan untuk kemajuan. Perubahan pandangan dunia dalam kerangka waktu yang umumnya singkat, jelas, belum membuat otoritas pemerintah lingkungan dan daerah setempat benar-benar mengetahui intisari dan aturan pelaksanaan kemerdekaan provinsi. Bagaimanapun, secara bertahap majelis mekanik pemerintah terdekat dan daerah setempat mulai memikirkan bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan provinsi. Latihan-latihan yang mengarah pada produktivitas dan upaya-upaya untuk lebih mengembangkan kualitas administrasi, kemajuan dan imajinasi dalam mengeluarkan kapabilitas kabupaten mulai diperkuat. Beberapa model dapat dirujuk bahwa organisasi administrasi di kabupaten tersebut secara efektif mendorong meningkatkan dan membina kemampuan dan kewibawaan mereka melalui pendidikan lanjutan, baik formal maupun non formal. Model lain adalah pengurangan strategi administrasi yang berkelok-kelok tanpa tujuan, dengan fokus kapabilitas.

Kompleksitas Permasalahan dan Ujian Globalisasi

Sesuai referensi kata Merriam Webster (2010) kata globalisasi (globalisasi) pertama kali digunakan pada tahun 1951. Globalisasi digambarkan sebagai kemajuan ekonomi dunia yang terkoordinasi secara tak terhindarkan yang pada dasarnya diperiksa oleh deregulasi, perkembangan modal yang bebas, dan penyadapan pasar kerja yang lebih murah. Kata globalisasi pada umumnya akan diletakkan pada pergerakan keuangan (Amri 2010: 2). Globalisasi pada dasarnya merupakan kekhasan yang luas, bagaimanapun, benar-benar dapat dibagi menjadi beberapa kelas, seperti globalisasi di bidang keuangan harus terlihat dalam masalah perdagangan yang Efisien. Asosiasi Pertukaran Dunia (WTO) mengelola strategi pertukaran global, khususnya deregulasi. Tenaga kerja dan produk seharusnya bergerak secara efektif dari negara yang berbeda tanpa memperoleh batasan baik pajak maupun bukan pajak. Globalisasi di bidang isu dan filosofi pemerintahan dapat dilihat dari berkembangnya isu demokratisasi dan Kebebasan dasar. Jiwa demokratisasi yang terjadi di satu kabupaten dapat menyebar ke berbagai daerah. Isu demokratisasi di Eropa timur menggulingkan sistem sosialis diktator dalam perkembangan yang stabil. Globalisasi di bidang kebudayaan dapat terkait dengan gaya hidup yang ada di satu wilayah diikuti oleh keseluruhan populasi di wilayah lain. Misalnya, masyarakat standar AS mengikuti sesuai dengan pesanan paling ramah di tempat lain. Ini harus terlihat dari pendakian individu yang mengambil bagian dalam Mcdonald's, coco cola. Desain pakaian ala Levis yang disukai anak muda AS (Siswanto 2010:1-8)

Selain beberapa hal di atas, tampaknya kita juga perlu memperhatikan perkembangan beberapa hal masalah yang berbeda, misalnya, administrasi internasional yang mengarahkan arus globalisasi yang berbeda yang telah memberdayakan rekonsiliasi kehidupan lokal lokal/lokal di seluruh dunia. daerah lokal di berbagai bidang. Dalam bidang pertukaran, badan legislatif negara Indonesia merupakan individu dari WTO yang terkait dengan pedoman dalam hal tersebut. Sejak kemunculannya, globalisasi secara bertahap membentuk kembali contoh hubungan antar penghibur dalam hubungan dunia. Sebelumnya, individu dapat terhubung dengan orang lain di sekitar mereka. Bagaimanapun, di samping kemajuan metode korespondensi dan transportasi, hubungan antarmanusia melampaui batas-batas lokal. Secara bersamaan, bangsa-bangsa di dunia juga memperluas hubungan mereka. Siklus globalisasi dari satu perspektif melemahkan pekerjaan negara, namun sekali lagi memperkuat pekerjaan masyarakat, tetapi sekali lagi memperkuat pekerjaan wilayah lokal di seluruh dunia. Saat ini, internasionalisme yang menekankan tugas negara dihadapkan sepenuhnya pada globalisasi yang tidak menonjolkan tugas negara (mubah 2010:1).

Dari sebagian pemikiran dan sudut pandang pragmatis yang terselubung dalam subjek globalisasi di atas, globalisasi sendiri dihadapkan pada rumitnya isu dan kesulitan. Secara umum, kerumitan ini dapat digambarkan dalam tiga pemahaman: pertama, globalisasi tidak dapat dihindari, namun bagaimana mengurangi konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi kepentingan setiap pelaku, terutama bagi setiap penghuni, baik secara moneter maupun tegas, keamanan dan budaya. Kedua, dampak globalisasi yang terjadi di tingkat regional dan publik terhadap spesialis terbuka dan pelaku pasar / moneter. Ketiga, isu penataan desain dan contoh keterkaitan antara penghibur yang lebih merata bekerja di ranah globalisasi, atau secara keseluruhan, kaburnya garis publik yang dinamis di bidang globalisasi moneter dapat mengarah kekuasaan negara., pertemuan lokal atau kemitraan perusahaan transnasional.

Index dan Strategi Globalisasi

Dalam laporan tahunan globalisasi yang diperkenalkan oleh AT Kearney / Worldwide system 2003-2006, posisi Indonesia tidak berubah, yaitu dalam kerangka berpikir dari belakang (least globalized country). Indonesia menempati posisi ke-60 dari 62 negara.

Tingkat paling signifikan (negara paling terglobalisasi) dilibatkan oleh negara-negara ciptaan, seperti Singapura, Swiss, Denmark, Kanada, AS, Australia, dan Kerajaan Bersatu. Catatan-catatan ini dinilai melalui informasi keuangan, politik, imajinatif, dan karakter. Dalam campuran Uang, Indonesia menempati posisi ke-52, individual box ke-59, advancement accessibility ke-51, dan political comprehension ke-50. Tidak jauh berbeda dengan catatan A. T. Kearney, KOF globalisasi juga mengukur komponen keuangan, sosial, dan politik dari globalisasi. Ini hanya ukuran rekor globalisasi dengan lebih banyak negara dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam kerangka KOF globalization notes outline 2007, keadaan Indonesia sejalan dengan 78 dari 122 negara. Penempatan keseluruhan ini bergantung pada data dari tahun 1970 hingga 2004 dengan 25 variabel (Cahyano 2007). Ikhtisar ini menilai globalisasi Bidang Moneter lebih dominan daripada aspek-aspek lain, namun juga mengingat fakta bahwa pengaruhnya asli dan kritis.

Terkait dengan rundown posisi globalisasi Indonesia, sejauh ini sangat vital untuk mendorong eksplorasi dan inovasi guna membantu prinsip-prinsip permainan dan aksesibilitas data tentang globalisasi di kemudian hari. Hal ini karena kedudukan negara dan masyarakat masih rendah dalam mengelola kekuasaan dunia. Seperti Mike Tyson (past heavyweight champion) melawan Chis John (legenda kelas ringan), menempatkan Indonesia dalam pertarungan yang tidak setingkat dirinya. Faktanya, banyak yayasan eksplorasi telah membuat lompatan ke depan sehubungan dengan bahaya globalisasi, misalnya, membuat contoh keseriusan terdekat terhadap invasi organisasi asing, termasuk Center for Monetary and Political Exploration IPSK LIPI atau Center for Strategic and International Studies (CSIS). Usulan yang diberikan luar biasa, memberdayakan metode kursus globalisasi yang ada (dari keamanan negara hingga keamanan manusia) agar lebih siap menjaga kepentingan (bantuan pemerintah) untuk beberapa jaringan. Hal ini dapat menjadi sumbangsih bagi otoritas publik untuk memiliki 'impian' tentang globalisasi. Pemeriksaan menyeluruh dan kolaborasi lintas kelembagaan terhadap peningkatan globalisasi dan dampaknya di tingkat lokal dan publik merupakan hal yang signifikan, khususnya bagi delegasi Ipsk LIPI yang bertanggung jawab atas isu-isu sosial di Indonesia.

Selain upaya kreatif untuk memperkuat visi globalisasi, penyelesaian kelembagaan tidak boleh diabaikan dalam pendekatan perencanaan. Salah satu yang seharusnya dapat dibayangkan adalah program perbaikan breaking point (limit working) untuk pemerintah, daerah dan pelaku pasar/keuangan. Dengan berkembangnya isu-isu (politik, keamanan, keuangan, sosial, dan Sosial), terjadi peningkatan jumlah pelaku (pelaku negara bagian dan non-negara) dan rumitnya contoh hubungan antar aktor, baik di dunia, publik. dan tingkat terdekat, kapasitas setiap penghibur harus ditingkatkan secara ahli. Tujuan utamanya adalah memiliki pilihan untuk melihat setiap pergantian peristiwa, memanfaatkan pintu terbuka yang ada, dan khususnya untuk mendesain ulang hubungan yang lebih disesuaikan antara tiga pelaku fundamental (Negara/Pemerintahan, Masyarakat, dan pasar).

Misalnya, dengan perkembangan Inovasi data dan Korespondensi (ITC) yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia harus menggarap kapasitas pegawai negeri sipil untuk memanfaatkan kantor elektronik (e-government) secara tegas dan ideal. Serta membangun kerangka kerja yang memadai dan membuat strategi mengelola penguatan aparatur negara dan kewajiban otoritas publik dalam memberikan jabatan dan landasan yang memuaskan. Bangunan Pembatas ini bisa sebagai ruang kelas, studio, persiapan, rapat, dan lain-lain. Pertimbangan sehubungan dengan peningkatan Inovasi Data dan Korespondensi (TIK) dan penguatan SDM harus sama luar biasa dengan prosedur yang ditetapkan. Perencanaan semacam ini bukan hanya tentang bagaimana menjalankan sistem dengan benar, tetapi juga dalam menangkap peluang yang diharapkan dari area bisnis, prosedur penciptaan,

pengendalian mutu, pengembangan produktivitas kerja lebih lanjut, informasi perizinan, informasi peningkatan pertukaran, hortikultura, konservasi sosial, mengetahui pengaturan terkait WTO, AFTA, dan lain-lain. Kolaborasi sebagai upaya bersama dan kolusi vital antara badan legislatif, penghibur transnasional, dan jaringan sangat membantu untuk menghadapi kontes dan menyelesaikan pertanyaan yang muncul. Kemudian, pada saat itu, pada saat itu, bangun wawasan moneter yang harus dipertahankan oleh kekuatan keuangan internal. Pekerjaan, posisi, dan metodologi Indonesia dalam perbincangan internasional juga belum menunjukkan hasil yang terbaik. Dengan cara ini, batas struktur harus diselesaikan untuk membuat bangunan dan merencanakan unit perintis yang kokoh. Pemerintah bis bekerja dengan upaya ini.

KESIMPULAN

Untuk menghadapi tantangn-tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Di era globalisasi, adaptasi dan transformasi budaya serta kebijakan sangat penting untuk menyikapi perubahan yang terjadi. Dalam konteks globalisasi,Indonesia perlu terus memperkuat posisinya dan meningkatkan daya saing dalam kenchah internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapaita SDM, penataan kelembagaan, pengembangan teknologi, dan kerjasama lintas lembaga dalam penelitian dan pengembangan. Dalam menghadapi kompleksitas masalah dan tantangan globalisi,Indonesia perlu memiliki strategi yang jelas dan terpadu. Diperlukan pemahaman yang mendalm tentang berbagai apek globalisasi serta upaya untuk meningktkan kapasita dan daya saing agar Indonesia dapat bersaing dalam kenchah global yng semakin kompleks. Dengan adanya perubahan sosial karena eksekusi otonomi daerah dan adanya tantangan dari arus globalisasi, Indonesia perlu memiliki visi yang jelas dalam menghadapi perubahan tersebut. Diperlukan adanya upaya yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan pelaku ekonomi untuk menciptakan lingkungan yang kondustif dalam menghadapi tantngan globalisasi. Secara keseluruhan, perubahan sosial karena eksekusi otonomi daerah dan kompleksitas masalah serta tantangan globalisasi membutuhkn sinergi dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Peran pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A. (2022). Sumber daya manusia inonesia di era globalisasi. *Jurnal Ilmiah Promis*, 3(2), 110-130.s
- Baka,A. (2020). Arus Globalisasi dan Kebijakan Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah (The Globalization Stream and Public Service Policy in the Era of Regionl utoonomy). *Jurnal Sipatokkong BPSDM SULSEL*, 1(2),202-201.
- Djuniarti, D.,Azis, A., Hamid, H., & Hambali, H. (2023). Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Konteks Hukum dan Politik Nasional. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(2),47-60.
- Hamonangan, I. (2020). Pasar, Tata kelola dan Hubungan Transional di Era Globalisasi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Dunia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 55-70.
- Kristhy,M.E. (2023). Indonesia Omnibus Law:Suatu Respon Atas Tantangan Kedaulatan Ekonomi Indonesia Sebagai Akibat Dari Pengaruh Tata Kelola Regulasi Global.*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 38-50.
- Mulyono, H. (2017). Geostrategis Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional. *Jurnal Lemhannas RI*, 5(1), 19-30.
-

- Surya, F.A. (2023). Pluralisme Hukum Dalam Persepektif Pancasila Tantangan Dalam Era Globalisasi. *Indonesia Journal of Legality of Law*, 6(1),207-212.
- Yuniarto,P.R. (2016). Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 67-95.
- Zuhro, R.S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerinthan Indonesia. *Interaktif: Jurnal ilmu-ilmu Sosial*, 4(1), 1-28.